

Siaran Pers

LANTIK KEPALA BIG, MENTERI BAMBANG TEKANKAN PENTINGNYA PERAN INFORMASI GEOSPASIAL BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA

JAKARTA (5/12) – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro melantik Hasanuddin Zainal Abidin sebagai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG). Dalam sambutannya, Menteri Bambang mengucapkan selamat bertugas bagi Kepala BIG yang kini resmi menjabat dan mengapresiasi jasa dan kinerja profesional pejabat sebelumnya, Priyadi Kardono. Peran BIG sangat penting mengingat Indonesia merupakan entitas maritim yang menjadi rumah bagi kekayaan alam serta biodiversitas daratan dan lautan. Data dan informasi geospasial mempunyai peranan penting dan strategis untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan karena memotret kondisi riil geospasial tanah air. “Badan Informasi Geospasial memiliki peranan besar bagi Republik Indonesia, baik untuk acuan informasi geospasial masa kini maupun untuk masa mendatang,” ungkap Menteri Bambang.

BIG memiliki peran penting untuk melaksanakan tiga tugas utama. *Pertama*, menjaga keutuhan NKRI, salah satunya melalui kebijakan kurva tertutup dalam penataan batas negara di darat dan laut, dan juga melalui perapatan batas wilayah Negara. *Kedua*, menyediakan data spasial untuk perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan daya saing nasional terutama di bidang ekonomi, antara lain melalui penyediaan peta dasar dan peta tematik untuk perencanaan kebijakan publik seperti peta dasar skala besar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). *Ketiga*, sebagai bagian dari aktivitas global, melalui keanggotaan BIG dalam berbagai organisasi internasional.

Pada 2016, seuai arahan Presiden RI Joko Widodo, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 disusun dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial dalam upaya pencapaian sasaran agenda prioritas nasional agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Holistik-Tematik memiliki arti bahwa untuk mencapai sasaran prioritas nasional, perlu koordinasi multi kementerian/lembaga. Integratif menunjukkan bahwa pencapaian agenda prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi dari kombinasi berbagai program/kegiatan, sedangkan spasial berarti perencanaan agenda prioritas nasional harus mempertimbangkan kondisi lokasi pembangunan. “Dengan demikian, data spasial memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan dan mengintegrasikan lokasi pembangunan lintas sektor hingga kedalaman koordinat petanya,” tegas Menteri Bambang.

Optimalisasi data akan terwujud bila didukung data spasial yang valid dan terintegrasi dalam satu sistem Kebijakan Satu Peta sehingga menghindari ketidaksinkronan data spasial yang seringkali menghambat pelaksanaan pembangunan. Pengembangan kawasan sering kali terbentur masalah konflik lahan yang terutama disebabkan oleh Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang tidak akurat akibat perizinan sektor-sektor yang saling tumpang tindih satu sama lain. Selain itu, standar dan format peta yang berbeda pada peta tematik tiap kementerian/lembaga dan pemerintah menyebabkan ketiadaan acuan bersama dalam pemanfaatan lahan. Juga, informasi yang tidak terhubung, duplikasi informasi, dan duplikasi

sumber daya berujung pada sulit menciptakan nilai tambah informasi karena sistem yang tidak terintegrasi.

Maka, Menteri Bambang memaparkan Kepala BIG mengemban amanah untuk melaksanakan Kebijakan Satu Peta dengan didukung Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi inisiasi untuk melakukan sinkronisasi terhadap perbedaan-perbedaan informasi sehingga konflik penggunaan lahan yang selama ini terjadi dapat segera terselesaikan. Kebijakan Satu Peta juga dapat digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi rencana pembangunan serta dasar pemberian izin antar sektor baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. “Upaya yang telah dilakukan BIG merupakan muara dari usaha bersama, yang pada akhirnya akan mendorong kepastian usaha dan kemudahan berinvestasi bagi para pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” tutup Menteri Bambang. ■

Jakarta, 5 Desember 2016

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon (021) 31936207, 3905650; Faksimile (021) 3145374
Email: humas@bappenas.go.id

